

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Teori

1. Akuntansi Sektor Publik

a. Pengertian Akuntansi Sektor Publik

Menurut Hasna Lathifa, Haryanto(2017:1) menyatakan bahwa, akuntansi sektor publik adalah untuk memberikan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan publik. Dalam beberapa hal, akuntansi sektor publik berbeda dengan akuntansi pada sektor swasta. Perbedaan sifat dan karakteristik akuntansi tersebut disebabkan karena adanya perbedaan lingkungan yang mempengaruhinya.

Biduri (2018:2) mendefinisikan akuntansi sektor publik adalah suatu kegiatan jasa yang aktivitasnya berhubungan dengan usaha, terutama yang bersifat keuangan guna pengambilan keputusan untuk menyediakan kebutuhan dan hak publik melalui pelayanan publik yang diselenggarakan oleh entitas perusahaan. Sedangkan menurut Halim dan Muhammad (2018:3) bahwa akuntansi sektor publik adalah suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari suatu organisasi atau entitas publik seperti pemerintah, LSM, dan lain-lain yang dijadikan informasi dalam mengambil keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukan.

Menurut Yuesti et al, (2020) sektor publik merupakan istilah tersendiri yang memiliki beragam defenisi, maksud dan tujuan. Beragam defenisi yang dimiliki oleh sektor publik ini disebabkan karena luasnya wilayah publik sebagai konsekuensi yang harus dihadapi, sehingga dalam setiap disiplin ilmu yang ada memiliki cara pandang berbeda dalam memahami dan mendeskripsikan istilah sektor publik. Seperti dalam sudut pandang ilmu ekonomi, sektor publik di deskripsikan sebagai kegiatan atau aktivitas operasi suatu lembaga atau organisasi dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak publik yang tujuannya memang dalam rangka menghasilkan sebuah produk atau jasa untuk melayani publik. Pada dasarnya organisasi atau lembaga sektor publik merupakan sebuah entitas yang segala aktivitasnya memang untuk ditujukan untuk memberikan pelayanan kepada publik dan memiliki tanggungjawab untuk melaporkan segala aktivitas operasi, program ataupun kebijakan yang diambil kepada publik ataupun pihak yang berkepentingan. Organisasi atau lembaga sektor publik biasanya memiliki visi dan misi untuk memberikan pelayanan kepada publik tanpa mencari keuntungan.

b. Jenis-jenis Akuntansi Sektor Publik

Organisasi-organisasi sektor publik sering dijumpai dalam kehidupan. Dalam kehidupan sehari-hari, seseorang cenderung berurusan dengan instansi pemerintah, seperti departemen pendidikan, departemen tenaga kerja, kantor pencatatan sipil, atau kepolisian. Selain

itu juga, seseorang berinteraksi dengan berbagai organisasi keagamaan, seperti MUI, Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, PGI (Persatuan Gereja Indonesia), KWI (Konferensi Waligereja Indonesia), dan lain-lain. Di bidang pendidikan dan kesehatan, dijumpai beragam organisasi sektor publik seperti universitas, sekolah, rumah sakit, puskesmas, dan balai kesehatan, dan yang juga termasuk organisasi sektor publik adalah partai-partai politik dan LSM di berbagai bidang. Biduri (2018:3) menyatakan bahwa jika dilihat secara garis besar, jenis-jenis organisasi sektor publik dapat dibagi menjadi tiga jenis, yaitu sebagai berikut:

1) Instansi Pemerintah

Instansi pemerintah merupakan bagian organisasi sektor publik yang berbentuk instansi pemerintah sebagai berikut:

- a) Pemerintah pusat, termasuk didalamnya: (1) Kementerian seperti Departemen Dalam Negeri, Departemen Sosial, Departemen Keuangan, dan lain-lain; serta (2) Lembaga dan Badan Negara seperti KPU, KPK, dan lain-lain.
- b) Pemerintah Daerah, termasuk di dalamnya Satuan Kerja Perangkat Daerah seperti Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Asset Daerah, Kantor Pencatatan Sipil, dan lain-lain.

2) Organisasi Nirlaba Milik Pemerintah

Organisasi nirlaba milik swasta ini merupakan bagian organisasi sektor publik yang dimiliki dan dikelola oleh pihak

swasta. Contohnya: (a) Yayasan seperti Sampoerna Foundation, Dompot Dhuafa Republika, dan lain-lain; (b) sekolah dan universitas swasta; dan (c) Rumah sakit milik swasta.

c. Karakteristik Akuntansi Sektor Publik

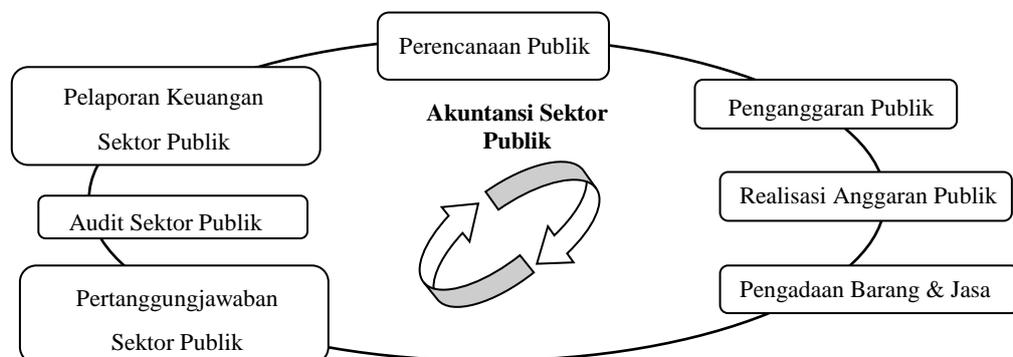
Akuntansi merupakan suatu aktivitas yang memiliki tujuan untuk mencapai hasil tertentu dan hasil tersebut harus memiliki manfaat. Dalam beberapa hal, akuntansi sektor publik berbeda dengan akuntansi pada sektor swasta. Perbedaan sifat dan karakteristik akuntansi tersebut disebabkan karena adanya perbedaan lingkungan yang mempengaruhi. Komponen lingkungan yang mempengaruhi organisasi sektor publik menurut Biduri (2018:5) antara lain:

- 1) Faktor ekonomi meliputi antara lain:
 - a) Pertumbuhan ekonomi
 - b) Tingkat inflasi
 - c) Nilai tukar mata uang
 - d) Infrastruktur
 - e) Pertumbuhan pendapatan per kapita (GNP/GDP)
- 2) Faktor politik meliputi antara lain:
 - a) Hubungan Negara dan masyarakat
 - b) Legitimasi pemerintah
 - c) Tipe rezim yang berkuasa
 - d) Ideologi Negara
 - e) Elit politik dan massa

- f) Jaringan internasional
 - g) Kelembagaan
- 3) Faktor cultural meliputi antara lain:
- a) Keragaman suku, ras, agama, bahasa dan buday
 - b) Sistem nilai di masyarakat
 - c) Historis
 - d) Sosiologi masyarakat
 - e) Karakteristik masyarakat
 - f) Tingkat pendidikan
- 4) Faktor demografi meliputi antara lain:
- a) Pertumbuhan penduduk
 - b) Struktur usia penduduk
 - c) Migrasi
 - d) Tingkat kesehatan

d. Elemen-elemen Akuntansi Sektor Publik

Bastian (2017:12) menjelaskan bahwa elemen-elemen akuntansi sektor publik dapat digambarkan dalam rangkaian siklus pada gambar berikut.



Gambar 1. Siklus Akuntansi Sektor Publik

Gambar siklus akuntansi sektor publik di atas, terlihat bahwa akuntansi sektor publik memiliki elemen-elemen sebagai berikut.

1) Perencanaan Publik

Dalam bagian ini, hal-hal pokok yang wajib diketahui adalah perencanaan. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, yaitu melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia sebagaimana tertuang dalam UU RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Pasal 1 Poin 1. Lebih dari itu, proses perencanaan yang dilaksanakan tersebut akan menentukan aktivitas dan fokus strategi organisasi sektor publik. Dalam prosesnya, memang perencanaan membutuhkan partisipasi publik yang akan sangat menentukan kualitas serta keberterimanya arah dan tujuan organisasi.

Lebih *implicit*, inti dari perencanaan adalah mengantisipasi masa depan berdasarkan tujuan yang ditetapkan. Hal tersebut dilakukan dengan persiapan yang didasarkan pada data dan informasi yang tersedia saat ini. Maka, aspek yang terkandung dalam perencanaan adalah perumusan tujuan dan cara mencapai tujuan tersebut dengan memanfaatkan sumber daya yang ada karena hakikat dan tujuan publik adalah kesejahteraan publik. Otomatis, tujuan perencanaan publik adalah perencanaan pencapaian kesejahteraan publik secara bertahap dan sistematis. Dapat diartikan bahwa perencanaan publik menjadi ilmu

yang mempunyai karakter tersendiri. Berkaitan dengan itu, topic dilanjutkan dengan penganggaran publik.

2) Penganggaran Publik

Berdasarkan penjelasan UU Nomor 17 Tahun 2003, anggaran adalah alat akuntabilitas, manajemen, dan kebijakan ekonomi. Sebagai instrumen kebijakan ekonomi, anggaran berfungsi untuk mewujudkan pertumbuhan dan stabilitas perekonomian serta pemerataan pendapatan supaya mencapai tujuan bernegara.

Lebih dari itu, anggaran memberikan rencana detail atas pendapatan dan pengeluaran organisasi agar pembelanjaan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Tanpa anggaran, organisasi tidak dapat mengendalikan pemborosan pengeluaran. Bahkan, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa pengelola atau pengguna anggaran dan manajer publik lainnya dapat dikendalikan melalui anggaran.

Tidak hanya itu, kesuksesan pelaksanaan anggaran ditentukan oleh kebijakan keuangan secara menyeluruh yang ditentukan oleh lembaga setingkat departemen atau lembaga pelaksana tertinggi, dukungan politis berbagai lembaga, dan akurasi perencanaan, terutama penganggaran yang dipengaruhi teknik *review* perkiraan anggaran. Topik selanjutnya adalah realisasi anggaran publik.

3) Realisasi Anggaran Publik

Secara teori, realisasi anggaran publik merupakan pelaksanaan anggaran publik yang telah direncanakan dan ditetapkan dalam bentuk program dan kegiatan nyata. Hal ini berarti fokus pelaksanaan anggaran terletak pada operasionalisasi program atau kegiatan yang telah direncanakan dan ditetapkan. Selain itu, realisasi anggaran menunjuk pada arahan atau pengendalian sistematis dari proses-proses yang mengubah *input* menjadi barang dan jasa. Dalam hal ini, proses tersebut sangat terkait erat dengan kualitas keluaran.

Perlu diketahui, realisasi anggaran terangkai dari suatu siklus yang terdiri atas kegiatan persiapan, proses pelaksanaan, dan penyelesaian. Siklus tersebut saling berkaitan satu dengan yang lain. Selanjutnya adalah pengadaan barang dan jasa publik.

4) Pengadaan Barang dan Jasa Publik

Pengadaan barang dan jasa publik adalah proses, cara, serta tindakan dalam menyediakan barang dan jasa bagi masyarakat atau publik. Barang dan jasa yang disediakan merupakan bentuk pelayanan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat.

5) Pelaporan Keuangan Sektor Publik

Secara umum, laporan keuangan adalah hasil akhir dari proses akuntansi. Sebagai konsekuensinya, laporan keuangan harus menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan

oleh berbagai pihak yang berkepentingan. Laporan keuangan menggambarkan pencapaian kinerja program dan kegiatan, kemajuan realisasi pencapaian target pendapatan, realisasi penyerapan belanja, serta realisasi pembiayaan. Selanjutnya, perlu diketahui beberapa komponen laporan, yaitu neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan arus kas yang dilengkapi catatan atas laporan keuangan, ataupun laporan tambahan lainnya, seperti laporan tahunan dan *prospectus*.

6) Audit Sektor Publik

Secara umum, pemeriksaan atau auditing adalah suatu investigasi independen terhadap beberapa aktivitas khusus. Mekanismenya adalah memosisikan dan menggerakkan makna akuntabilitas dalam pengelolaan sektor pemerintahan, badan usaha milik Negara (BUMN), instansi pengelola asset negara lainnya, ataupun organisasi publik non pemerintah, seperti partai politik, LSM, yayasan, dan organisasi di tempat peribadatan. Pemeriksaan ini bertujuan untuk mengekspresikan suatu opini secara jujur mengenai posisi keuangan, hasil operasi, kinerja, dan aliran kas yang disesuaikan dengan prinsip akuntansi berterima umum. Maka itu, laporan auditor merupakan media yang mengekspresikan opini auditor atau dalam kondisi tertentu bisa juga menyangkal suatu opini.

Dikaji dari perspektif proses, audit berhubungan erat dengan prinsip dan prosedur akuntansi yang digunakan oleh berbagai

organisasi sektor publik dan pemerintahan. Pihak-pihak tertentu, sebagai contoh auditor dan pengawas, wajib memiliki pemahaman yang komprehensif tentang pemeriksaan yang memang terlebih dahulu diprioritaskan, apa lagi pada pemahaman tentang sistem akuntansi yang dipakai oleh organisasi publik. Agar pemeriksaan berjalan lebih efisien, efektif, dan ekonomis, organisasi publik juga harus memahami bagaimana mempersiapkan segala sesuatu terkait audit yang akan dilakukan oleh auditor.

7) Pertanggungjawaban Publik

Dalam organisasi sektor publik, pertanggungjawaban atau akuntabilitas adalah pertanggungjawaban tindakan dan keputusan dari para pemimpin atau pengelola organisasi sektor publik kepada pihak yang memiliki kepentingan (*stakeholder*) dan masyarakat yang memberikan amanah kepadanya berdasarkan sistem pemerintahan yang berlaku.

e. Indikator Akuntansi Sektor

Berikut ini adalah siklus akuntansi keuangan sektor publik. Menurut Bastian (2017:19) siklus akuntansi keuangan sektor publik antara lain:

- 1) Transaksi, persetujuan jual beli antara satu pihak dengan pihak lain.
Transaksi yang dimaksud dalam hal ini adalah transaksi antara organisasi sektor publik dan pihak lain. Transaksi-transaksi inilah yang nantinya dilaporkan dalam laporan keuangan.

- 2) Analisis bukti transaksi, setiap transaksi selalu disertai dengan bukti pendukung yang berisi informasi tentang kegiatan transaksi tersebut. Dari bukti inilah yang kemudian akan dianalisis dan digunakan sebagai dasar pencatatan.
- 3) Pencatatan data transaksi, dari analisis bukti transaksi tersebut akan dilakukan pencatatan atas bukti transaksi yang lebih terjadi. Pencatatan transaksi dilakukan oleh bendahara dalam jurnal.
- 4) Pengikhtisaran, dalam buku besar terdapat daftar nama kelompok akun yang ada pada suatu organisasi. Berdasarkan nama akun yang ada, catatan atas transaksi tersebut dikelompokkan sesuai dengan namanya masing-masing. Hal inilah yang disebut dengan posting.
- 5) Pelaporan, selama satu periode akuntansi, transaksi yang dicatat dan dikelompokkan kedalam buku besar kemudian. Berdasarkan catatan tersebut, dibuatlah laporan keuangan yang akan disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Laporan keuangan sektor publik yang telah disusun tersebut kemudian dianalisis untuk menilai kebenaran dan realibilitasnya.

2. Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan

a. Pengertian Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan gambaran kondisi keuangan dan hasil usaha suatu perusahaan pada saat tertentu atau jangka waktu tertentu (Harahap, 2011). Adapun jenis laporan keuangan yang dikenal adalah Neraca, Laporan Laba/Rugi, Laporan Arus Kas, Laporan

Perubahan Modal dan catatan atas Laporan Keuangan menurut Fahmi (2013:2).

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (2012:5) mengemukakan bahwa: pengertian laporan keuangan adalah struktur yang menyajikan posisi keuangan dan kinerja keuangan dalam sebuah entitas. Tujuan umum dari laporan keuangan ini bertujuan untuk kepentingan umum adalah penyajian informasi mengenai posisi keuangan (*financial position*), kinerja keuangan (*financial performance*), dan arus kas (*cash flow*), dari entitas yang sangat berguna untuk membuat keputusan ekonomis bagi para penggunanya.

Bastian (2013:9) menyatakan bahwa laporan keuangan adalah hasil akhir dari proses akuntansi yang menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan oleh berbagai pihak yang berkepentingan. Sementara menurut Mahmudi (2013:143) menyatakan bahwa laporan keuangan merupakan output dari sistem akuntansi yang bermanfaat untuk pemberian informasi bagi pihak-pihak yang akan menjadikan informasi keuangan tersebut sebagai dasar pembuatan keputusan.

Laporan keuangan pemerintah harus menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik, keputusan ekonomi, social, maupun politik. Laporan keuangan pemerintah yang berguna (*useful*) memiliki makna laporan keuangan tersebut memuat isi informasi (*information*

content). Laporan keuangan akan berguna (*useful*) apabila laporan keuangan tersebut memenuhi standar kualitatif (Suhardjo, 2013:97).

b. Karakteristik Kualitas Laporan Keuangan

Karakteristik kualitatif laporan keuangan menurut (Pemerintah Indonesia, 2010) adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010) dijelaskan karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah sebagai berikut:

- 1) Relevan, yaitu informasi yang termuat didalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau kini dan memprediksi masa depan serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Informasi yang relevan memiliki unsur-unsur berikut:
 - a) Manfaat umpan balik (*Feedback Value*) adalah informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan alat mengoreksi ekspektasi di masa lalu.
 - b) Manfaat prediktif (*Predictive Value*) adalah informasi yang dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil lalu dan kejadian masa kini.
 - c) Tepat waktu adalah informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.

- d) Lengkap adalah informasi yang disajikan mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Informasi yang melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.
- 2) Andal, yaitu informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi yang andal memenuhi karakteristik berikut:
- a) Penyajian jujur adalah informasi yang menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan disajikan.
 - b) Dapat diverifikasi adalah informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak jauh beda.
 - c) Netralitas adalah informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.
- 3) Dapat dibandingkan, yaitu informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya.

Dapat dipahami, yaitu informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Nomor 1 Paragraf 9 sebagaimana terdapat di Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menyatakan bahwa laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Laporan keuangan pemerintah sangat berperan sebagai wujud akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, dalam rangka memenuhi seluruh informasi yang diperlukan dalam mewujudkan kualitas pelaporan keuangan pemerintah yang dikehendaki diperlukannya ukuran normative. Kualitas pelaporan keuangan dapat diukur dengan beberapa indikator (Darwanis, Saputra, & Kartini, 2016) antara lain:

- a) Manfaat dari pelaporan keuangan yang dihasilkan, yaitu merupakan salah satu unsur prasyarat normatife pelaporan

keuangan, yaitu relevan. Laporan keuangan dikatakan relevan apabila memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*), yakni informasi dalam laporan keuangan memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau memperbaiki harapan yang telah dibuat sebelumnya dan memiliki manfaat prediktif (*prediktif value*), yakni informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.

- b) Ketepatan waktu pelaporan keuangan, yaitu penyajian laporan keuangan secara tepat waktu merupakan aspek penting untuk memperoleh keunggulan dalam pengambilan keputusan. Laporan keuangan akan bermanfaat jika disampaikan secara tepat waktu kepada pemakainya, informasi yang tepat waktu akan memiliki nilai dan dapat berpengaruh terhadap pengambilan keputusan.
- c) Kelengkapan informasi yang disajikan, yaitu informasi akuntansi keuangan pemerintah harus disajikan selengkap mungkin, serta mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Informasi utama termuat dengan jelas agar mencegah kekeliruan dalam penggunaan informasi. Informasi yang tidak lengkap bisa menimbulkan kesulitan karena bagian informasi yang tidak

dicantumkan bisa saja merupakan unsur penting dalam pengambilan keputusan itu sendiri.

- d) Penyajian secara jujur, yaitu informasi akuntansi pemerintah yang harus disajikan dengan jujur setiap transaksi serta peristiwa lainnya sehingga menciptakan transparansi dan akuntabilitas, semakin jujur dalam penyajian laporan keuangan, maka akan meningkatkan terwujudnya akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.
- e) Isi laporan keuangan dapat diverifikasi, yaitu informasi yang disajikan laporan keuangan harus dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh. Ada dua cara untuk memverifikasi laporan keuangan, secara langsung dan tidak langsung. Verifikasi langsung terhadap laporan keuangan dilakukan melalui observasi, perhitungan, dan pengukuran.
- f) Isi laporan keuangan dapat dibandingkan, yaitu informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal maupun eksternal.

g) Keakuratan dan kejelasan informasi yang disajikan, yaitu informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus akurat dan jelas, sehingga mudah dipahami dan dimengerti oleh para pengguna laporan keuangan. Oleh karena itu, pengguna harus memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas akuntansi dan pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

3. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Istilah kinerja berasal dari *job performance* atau *actual performance* (prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai oleh seseorang), atau juga hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang ingin dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya (Mangkunegara:2015:67).

Menurut Mulyadi (2015:63) kinerja (prestasi kerja) adalah hasil kerja yang dicapai oleh pekerja atau karyawan secara kualitas dan kuantitas yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawab mereka.

Sedangkan menurut Sutrisno (2015:151) prestasi kerja adalah sebagai hasil kerja yang telah dicapai seseorang dari tingkah laku kerjanya dalam melaksanakan aktivitas kerja.

Berdasarkan pendapat di atas, disimpulkan kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggungjawab masing-masing

dalam rangka upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral maupun etika.

Presiden Republik Indonesia (2010) menyatakan bahwa akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan ataupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui pertanggungjawaban secara periodik.

- a. Prinsip-Prinsip Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- Menurut Lembaga Administrasi Negara (LAN) dalam Wulandari (2018), akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dapat terwujud dengan baik apabila memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:
- 1) Beranjak dari sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber-sumber daya yang konsisten dengan asas-asas umum penyelenggaraan negara.
 - 2) Komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi yang bersangkutan.
 - 3) Menunjukkan tingkat pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.
 - 4) Berorientasi pada pencapaian visi dan misi, serta hasil dan manfaat yang diperoleh.
 - 5) Jujur, obyektif, transparan dan akurat.

6) Menyajikan keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

b. Indikator Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Indikator akuntabilitas kinerja instansi pemerintah menurut Nasim & Oktari (2017) merupakan suatu tatanan, instrumen, dan metode pertanggungjawaban yang intinya meliputi tahap sebagai berikut:

- 1) Penetapan rencana strategi
- 2) Pengukuran kinerja
- 3) Pelaporan kinerja
- 4) Pemanfaatan informasi kinerja bagi perbaikan kinerja secara berkesinambungan

B. Penelitian Terdahulu

Berikut ini adalah rangkuman beberapa penelitian terdahulu yang dianggap relevan dengan penelitian ini, untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada tabel berikut:

NO	NAMA PENELITI/TAHUN	JUDUL PENELITIAN	VARIABEL PENELITIAN	METODE PENELITIAN	HASIL PENELITIAN
1	Veny Marlana, Subaeti (2018)	Pengaruh Penerapan Standar Pelaporan Akuntansi Sektor Publik dan Pengawasan Kualitas Pelaporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (Studi Kasus: BPKD, Inspektorat, DPMD dan DPRD di Provinsi Bengkulu)	X1: Penerapan Standar Pelaporan Akuntansi Sektor Publik X2: Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan Y: Berpengaruh Signifikan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	-Uji Validitas -Uji Reliabilitas -Uji Hipotesis -Uji F-simultan -Uji Koefisien Determinasi (R ²)	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan pelaporan akuntansi sektor publik dan pengawasan kualitas pelaporan keuangan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah

NO	NAMA PENELITI/TAHUN	JUDUL PENELITIAN	VARIABEL PENELITIAN	METODE PENELITIAN	HASIL PENELITIAN
2	Kurniwan, A (2018)	Pengaruh Efektivitas Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Akuntabilitas Keuangan	X1: Efektivitas Sistem Akuntansi Keuangan X2: Sistem Pengendalian Intern Y: Kualitas Akuntabilitas Keuangan	-Uji Reliabilitas -Uji Validitas -Uji Normalitas -Uji Multikolinieritas -Uji Autokorelasi -Uji Heteroskedastisitas -Uji Hipotesis -Analisis Regresi Linier Berganda -Uji Koefisien Determinasi (R ²) -Uji F -Uji t	Hasil penelitian ini menunjukkan efektivitas SAKD terbukti berpengaruh terhadap kualitas akuntabilitas keuangan, sistem pengendalian internal terbukti berpengaruh terhadap kualitas akuntabilitas keuangan

NO	NAMA PENELITI/TAHUN	JUDUL PENELITIAN	VARIABEL PENELITIAN	METODE PENELITIAN	HASIL PENELITIAN
3	Putra, P.A. (2021)	Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Penerapan Akuntansi Sektor Publik, Pengendalian Akuntansi dan Ketaatan Pada Peraturan Perundangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi (Studi Empiris Pada Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Kuantan Singingi	X1: Kejelasan Sasaran Anggaran X2: Penerapan Akuntansi Sektor Publik X3: Pengendalian Akuntansi X4: Ketaatan Pada Peraturan Perundangan Y: Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	-Uji Validitas -Uji Reliabilitas -Uji Asumsi Klasik -Uji Normalitas -Uji Multikolinieritas -Uji Hipotesis -Uji F -Uji t -Uji koefisien Determinasi (R^2)	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh kejelasan sasaran anggaran, penerapan akuntansi sektor publik, Pengendalian akuntansi dan ketaatan pada peraturan perundangan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja OPD dalam penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah Kabupaten Kuantan Singingi. Dan secara parsial kejelasan sasaran anggaran, penerapan akuntansi sektor publik, pengendalian akuntansi dan ketaatan pada peraturan perundangan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

NO	NAMA PENELITI/TAHUN	JUDUL PENELITIAN	VARIABEL PENELITIAN	METODE PENELITIAN	HASIL PENELITIAN
4	Vidyasari, F. N. A., & Suryono, B. (2021)	Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	X1: Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah X2: Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Y: Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	-Uji Validitas -Uji Reliabilitas -Uji Asumsi Klasik -Uji Normalitas -Uji Multikolinieritas -Uji Heteroskedastisitas -Analisis Regresi Linier Berganda -Uji Hipotesis -Uji t -Uji F -Uji Koefisien Determinasi (R ²)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, (2) sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

NO	NAMA PENELITI/TAHUN	JUDUL PENELITIAN	VARIABEL PENELITIAN	METODE PENELITIAN	HASIL PENELITIAN
5	Septiani, S., Defitri, S.Y., & Sukraini, J. (2020)	Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran dan Penerapan Akuntansi Sektor Publik Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Empiris Pada OPD Kabupaten Solok)	X1: Kejelasan Sasaran Anggaran X2: Penerapan Akuntansi Sektor Publik Y: Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	-Uji Validitas -Uji Reliabilitas -Uji Asumsi Klasik -Uji Normalitas -Uji Multikolinieritas -Uji Heteroskedastisitas -Analisis Regresi Linier Berganda -Uji Hipotesis -Uji t -Uji F -Uji Koefisien Determinasi (R^2)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kejelasan sasaran anggaran (X1) dan penerapan akuntansi sektor publik (X2), berpengaruh secara simultan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Y).

C. Kerangka Konseptual Penelitian

Untuk mengetahui masalah yang akan dibahas, perlu adanya kerangka konseptual penelitian yang merupakan landasan dalam meneliti masalah yang digambarkan sebagai berikut:

1. Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik (X1) Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y)

Akuntabilitas kinerja merupakan salah satu kata kunci bagi terwujudnya *good governance* dalam pengelolaan organisasi publik. Jadi, tidak salah jika siklus akuntansi sektor publik diakhiri dengan proses pertanggungjawaban publik. Proses inilah yang menentukan penilaian keberhasilan sebuah organisasi publik dalam mencapai tujuannya. Kinerja organisasi dapat diraih dengan mengefektifkan dan mengefisienkan hasil dari proses organisasi, yakni perencanaan, penganggaran, realisasi anggaran, pengadaan barang dan jasa, pelaporan keuangan, audit serta pertanggungjawaban publik.

Dalam penerapan akuntansi sektor publik, pengawasan dan kualitas laporan keuangan pemerintah berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah mengemukakan bahwa penerapan akuntansi sektor publik terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sangat berpengaruh baik secara parsial maupun simultan. Penerapan akuntansi sektor publik memberikan sumbangan bagi peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam hal penyajian informasi pertanggungjawaban mengenai tujuan, fungsi dan objek pengeluaran.

Peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah menuntut adanya pengendalian akuntansi sektor publik untuk mengetahui sejauh mana kewenangan dan tanggungjawab yang diberikan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya. Penggunaan teknologi informasi di lingkungan sektor publik dapat membantu pemerintah dalam memberikan informasi dengan lebih cepat, efektif dan efisien kepada masyarakat.

2. Pengaruh Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan (X2) Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y)

Laporan keuangan merupakan komponen penting pada penyelenggaraan pemerintah, karena laporan keuangan berdampak pada kinerja dalam pengelolaan keuangan yang dikaitkan dengan fungsi pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Adanya pengaruh pengawasan kualitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas yaitu secara teoritis penerapan akuntansi sektor publik dan pengawasan terhadap kualitas laporan keuangan instansi pemerintah akan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah baik secara parsial maupun secara bersama-sama. Dari pemaparan diatas dapat penulis simpulkan bahwa pengawasan kualitas laporan keuangan sangat berpengaruh pada akuntabilitas. Karena dengan adanya laporan keuangan yang baik atau berkualitas akan berindikasi pada akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas laporan keuangan yang dibuat.

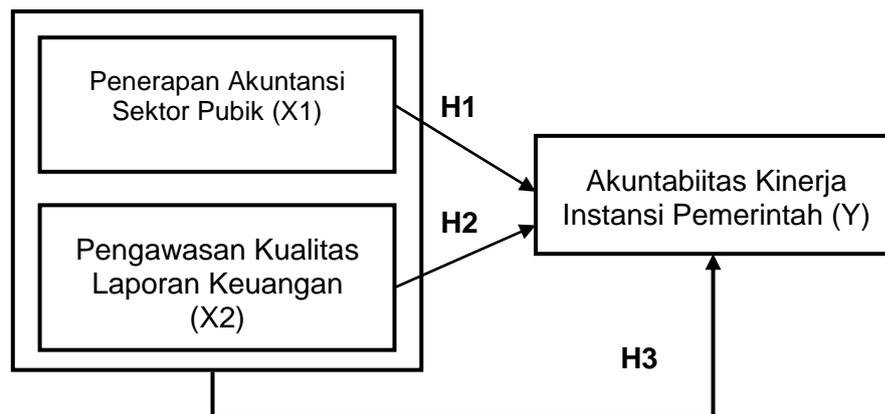
3. Pengaruh Akuntansi Sektor Publik dan Pengawasan Kualitas Laporan (X) Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y)

Pemanfaatan teknologi informasi dalam sektor publik dan pemaparan laporan keuangan merupakan suatu kebutuhan yang harus dipenuhi dalam rangka mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam instansi pemerintah.

Hasil dari penelitian Wina & Khairani (2017) menunjukkan bahwa kedua variabel secara simultan berpengaruh positif semakin tinggi pengaruh standar pelaporan akuntansi sektor publik dan pengawasan kualitas laporan keuangan maka akan meningkatkan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang semakin baik pula.

Dengan kata lain, apabila akuntabilitas kinerja instansi pemerintah menyajikan laporan keuangan sesuai standar pelaporan akuntansi sektor publik, lalu dibarengi dengan pengawasan terhadap kualitas penyajian laporan keuangan yang dilakukan oleh pihak eksternal dan pihak internal yang dilakukan secara independensi, maka akan menghasilkan kualitas laporan keuangan yang berkualitas sesuai standar pemerintahan yang berlaku.

Berdasarkan latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, dan landasan teori yang telah dikemukakan di atas, maka kerangka penelitian yang di ajukan adalah sebagai berikut:



Gambar 2. Kerangka Konseptual

D. Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian dan didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data (Sugiyono 2016:99).

Berdasarkan rumusan masalah, tinjauan teori dan penelitian terdahulu pada penelitian ini penulis dapat mengambil hipotesis penelitian sebagai berikut:

1. Terdapat pengaruh antara variabel penerapan akuntansi sektor publik terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah secara parsial.
2. Terdapat pengaruh antara variabel pengawasan kualitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah secara parsial.

3. Terdapat pengaruh antara variabel penerapan akuntansi sektor publik dan pengawasan kualitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah secara simultan.